

SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PEMUSIK JALANAN (PENGAMEN) DI KOTA MAKASSAR



Oleh

REZKY EKA PUTRI

NIM B 111 11 332

BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG
DILAKUKAN PEMUSIK JALANAN (PENGAMEN) DI KOTA MAKASSAR**

OLEH :

REZKY EKA PUTRI

B111 11 332

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PEMUSIK JALANAN (PENGAMEN) DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

REZKY EKA PUTRI


B111 11 332


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, 7 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

**A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : REZKY EKA PUTRI

Nomor Pokok : B111 11 332

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN PEMUSIK
JALANAN (PENGAMEN) DI KOTA MAKASSAR.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Mei 2016

Pembimbing I,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Pembimbing II,



Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: REZKY EKA PUTRI
Nomor Pokok	: B11111332
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Masyarakat Dan Pembangunan
Judul Skripsi	: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) di Kota Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2016



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Rezky Eka Putri, B11111332, Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Judul Skripsi: Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) di Kota Makassar, dibawah arahan dan bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing I dan A. Tenri Famauri sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban terkait dengan upaya-upaya menanggulangi kejahatan pengamen di Kota Makassar serta faktor penyebab kejahatan tersebut.

Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar yakni di Polsek Ujung Pandang dan Dinas Sosial. Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen dari masing-masing lembaga yang terkait, buku serta peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pengamen di Kota Makassar terus mengalami kenaikan. Upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Makassar yaitu: (1) Upaya pencegahan, (2) Upaya tindak lanjut. Upaya oleh Dinas Sosial berupa: (1) Pembinaan pencegahan, (2) Pembinaan lanjutan, (3) Usaha Rehabilitasi. Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh pengamen diakibatkan karena perasaan sensitif yang dimiliki oleh pengamen, pembelaan diri terhadap razia, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor agama.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keihklasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) di Kota Makassar.”

Skripsi ini persembahkan dari Penulis sebagai bentuk sumbangan akhir jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tentu saja berasal dari apa yang pernah Penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Serta dari hasil penelitian dan diskusi Penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Mengawali ucapan terima kasih ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahanda H. Burhanuddin, S.H dan Ibunda Hj. Nursan, S.H atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama ini yang telah membesarkan dan mendidik, serta senantiasa mendoakan demi keberhasilan Penulis. Terima kasih juga kepada Nenek tercinta Hj. Norma

Katoe serta adindaku tercinta Reza Dwi Putra dan ponakanku tersayang Aksa, Nesha dan Adiba yang selalu memberikan keceriaan, tawa, dan menemani Penulis menyusun skripsi ini serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuan dan dukungannya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi Penulis dalam suka maupun duka. Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Ahmadi Miru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta bapak Ahmad, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik Penulis.

4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. A. Tenri Famauri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada Penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Bapak Dr. Hasrul, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H, selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan melayani urusan administrasi serta bantuan lainnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu Penulis selama proses penelitian.
8. Bapak Bripka Hendra H. Susanto, S.H dan bapak Drs. H. Mas'ud, S.MM serta responden dan narasumber lainnya yang telah memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian Penulis.
9. Sahabat sekaligus seseorang yang spesial Hidayat, S.P yang senantiasa memberikan semangat dan menemani Penulis dalam melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

10. Sahabat-sahabatku tercinta yang senantiasa mendukung sejak Penulis duduk di bangku SD sampai sekarang (Wina, Randy dan Olivia), sahabat-sahabatku tersayang (Akram Hadinata, Cocci, Mel, Fiser, Uya, Syahril, Udin, Riko, Abdi, Chiko, Fahmi, Surya, Carla, Melsya, Okta, Ira, Fitrah, Muti dan Halim), serta saudara-saudaraku di Fakultas Hukum Unhas yaitu Aulia, Iyak, Linda, Icha, Inna, Afli, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan, motivasi dan nasihat, serta bantuannya selama ini kepada Penulis.
11. Anshari Sanusi, Pelatih Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin serta Keluarga besar UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga Besar UKM Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman-teman Mediasi angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman KKN Regular Gel. 87 UNHAS, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Anty, Titi, Ulfa, Fany, Kholis, Ogi, dan Sandy, terima kasih atas motivasinya kepada Penulis.
15. Seluruh pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat Penulis sebutkan satu

persatu, terima kasih atas bantuannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Semoga Allah, SWT. senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Aamiin Ya Rabbal Alaamiin...

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 18 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	6
B. Objek Kajian Sosiologi Hukum	13
C. Pemusik Jalanan (Pengamen).....	16
D. Kejahatan	22
E. Faktor Penyebab Kejahatan	26
F. Perubahan Sosial	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Teknik Pengumpulan Data	34
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Tentang Kota Makassar	37
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) Di Kota Makassar	39

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) Di Kota Makassar.....	58
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pengamen di Kota Makassar	39
Tabel 2. Jumlah Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen	40
Tabel 3. Jenis-Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2013	42
Tabel 4. Jenis-Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2014	43
Tabel 5. Jenis-Jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2015	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat ditandai dengan kemiskinan yang ada dimana-mana, baik di desa maupun di kota. Di setiap kota kita dapat melihat pasti ada daerah yang perumahannya berhimpitan dengan daerah kumuh. Banyaknya pengamen, pengemis, anak jalanan dan masih banyak lagi merupakan kenyataan yang menggambarkan masyarakat miskin perkotaan.

Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Makassar cenderung meningkat ditandai dengan munculnya berbagai fenomena sosial baik bersumber dari dalam masyarakat maupun yang bersumber dari luar masyarakat, industrialisasi dan deras arus informasi dan urbanisasi, sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pemusik jalanan (selanjutnya ditulis pengamen), serta adanya pelaku eksploitasi merupakan beban bagi Pemerintah Kota Makassar. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, urbanisasi, ketidaksediaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara

Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan serta negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) dinyatakan bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai Masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materil maupun spritual yang sehat yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, tujuan ini hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya serta menyeluruh dan merata. Selain itu kesejahteraan sosial harus diusahakan bersama oleh pemerintah dan seluruh masyarakat.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis diatur bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia.

Masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya termasuk di Kota Makassar. Kecenderungan anak jalanan untuk berbuat kerusakan dan melanggar tatanan hukum dan budaya masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi menyebabkan banyak diantara mereka demi mempertahankan hidupnya dengan terpaksa menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan.

Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anak jalanan sebagai sampah masyarakat dan kemudian mempersempit ruang *aksesibilitas* mereka terhadap fasilitas-fasilitas umum yang menjadi kebutuhan mereka.

Anak jalanan selama ini dipandang masyarakat sebagai anak yang banyak membuat ketidaknyamanan di daerah tertentu, yaitu melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, memeras, mencuri, menjual narkoba, sampai yang paling menyedihkan seperti melakukan pekerjaan yang bersinggungan dengan seksualitas.

Pengamen adalah kegiatan bermain musik dari satu tempat ke tempat lain dengan mengharapkan imbalan sukarela. Dengan demikian dapat di katakan bahwa pengamen adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasih orang.

Keberadaan pengamen dinilai sebagian besar masyarakat telah mengganggu ketenangan dan kenyamanan mereka. Hal ini disebabkan tak henti-hentinya mereka selalu berdatangan secara rutin dan bergantian. Para pengamen juga terkadang marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar apabila ditolak untuk mengamen. Dan parahnya lagi apabila mereka tersinggung dapat menyebabkan penyerangan fisik terhadap warga masyarakat tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Pandang dan Dinas Sosial Kota Makassar untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polsek Ujung Pandang dan Dinas Sosial Kota Makassar untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya ilmu sosiologi hukum.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang terjadi diakibatkan oleh pemusik jalanan (pengamen).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Sosiologi berasal dari kata Latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *logos* berarti “kata” atau “berbicara”. Jadi Sosiologi artinya adalah “berbicara mengenai masyarakat”. Bagi August Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.¹

Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis sehingga sering disalahtafsirkan bukan hanya oleh kalangan nonhukum, melainkan juga dari kalangan hukum sendiri. Yang pasti, pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh ilmu hukum, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata dan ilmu hukum acara. Persamaannya hanyalah bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, objeknya adalah hukum.²

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian dari berbagai pakar sosiologi dan sosiologi hukum.

¹ Soerjono Soekanto, 1969, *Sosiologi Suatu Pengantar*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 15.

² Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 5.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi:³

“Sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial atau proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Selanjutnya menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan segi kehidupan politik, antara segi kehidupan agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial”.

Menurut Achmad Ali:⁴

“...sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif...”.

Ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai kaidah atau norma yaitu yang mengatakan bagaimana seseorang seharusnya bertindak jadinya lain dari ilmu yang mempelajari bagaimana orang itu bertindak dalam masyarakat di dalam kenyataannya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu sosiologi hukum.⁵

Jadi sosiologi hukum memandang hukum dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba untuk memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Pada dasarnya, sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan bahwa justru

³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 25.

⁴ Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 7.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 9.

sistem-sistem sosial yang lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang memberi arti dan pengaruh terhadap hukum.⁶

Adapun beberapa penjelasan mengenai karakteristik sosiologi hukum menurut para ahli antara lain:

1. Roscoe Pound

Pound, seorang ahli hukum dari Amerika dan mantan dekan *Harvard Law School*, merupakan salah seorang tokoh dari aliran *sociological jurisprudence*. Roscoe Pound dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence* bukan *sociology of law*).⁷

Pound dan Lloyd membedakan secara cermat antara *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum:⁸

- a) *Sociological jurisprudence*. Pound refers to this study of peculiar characteristics of legal order, i.e. an aspect of jurisprudence proper. Lloyd writes of it a branch of the normative sciences, having the objective of making the law more effective in action, and based on subjective values.
 - b) *Sociology of law*. Pound refers to this study as "sociology proper", based on concept of as one of means social control. Lloyd writes of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. It is concerned with an examination of why the law sets about its task in the way it does. It views law as the product of social system and as a means of controlling and changing that system.
- (a) Pound mengacu pada ini sebagai studi tentang karakteristik khas dari tatanan hukum, yaitu aspek hukum yang tepat. Lloyd menulis itu sebagai cabang ilmu normatif, memiliki hukum yang lebih efektif dalam tindakan dan berdasarkan nilai-nilai subjektif.

⁶ Achmad Ali, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 10.

⁷ R. Otje Salman, 1993, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 33.

⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Beberapa penulis lain menggunakan istilah untuk merujuk pada sosiologi sekolah yurispudensi, yaitu orang ahli hukum yang terlihat dalam sebuah studi masyarakat berarti dimana ilmu hukum mungkin dibuat lebih tepat.

- b) Pound mengacu studi ini sebagai sosiologi yang tepat, didasarkan pada konsep hukum sebagai salah satu sarana kontrol sosial. Lloyd menulis itu sebagai dasarnya ilmu deskriptif menggunakan teknik empiris. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan mengapa hukum menetapkan tentang tugas-tuganya dalam cara ia dilaksanakan. Ini memandang hukum sebagai produk dari sistem sosial dan sebagai sarana pengendalian dan mengubah sistem itu.)

Pokok pemikiran Pound berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses. Pembentukan aturan, interpretasinya maupun penerapannya hendak dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Pound sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pound membedakan pengertian *law in books* disatu pihak dan *law in action* di lain pihak. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif maupun hukum ajektif. Ajarannya tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang diterapkan sesuai pola-pola perilaku.⁹

2. Eugen Ehrlich

⁹ *Ibid*, hlm. 35-36.

Eugen Ehrlich, seorang ahli hukum dan sosiolog dari Austria yang hidup pada zaman Weber, dan seringkali dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*).¹⁰

Ehrlich kemudian menjadi sangat terkenal dengan konsepsinya mengenai hukum yang hidup (*living law*), sebagai lawan hukum perundang-undangan. Dengan konsepsinya itu pada dasarnya hendak dikatakan, bahwa hukum itu tidak kita jumpai dalam perundang-undangan, di dalam keputusan hakim maupun di dalam ilmu hukum, melainkan di dalam masyarakat itu sendiri.¹¹

Bagi Ehrlich, hukum hanya dapat dipahami dalam fungsinya dimasyarakat. Ehrlich berpendapat terdapat dua sumber hukum yang keduanya saling melengkapi, yaitu:¹²

- a) *Legal history and jurisprudence, that is, useful precedents and written commentaries; and*
 - b) *"living law" derived from current custom within society and in particular, from the norm-creating activities of numerous groupings in which members of society were involved.*
- (a) Sejarah hukum dan yurisprudensi, yaitu *precedents* berguna dan komentar tertulis; dan
- b) "hukum yang hidup" yang berasal dari kebiasaan saat dalam masyarakat dan khususnya, dari kegiatan norma menciptakan sejumlah kelompok di mana anggota masyarakat yang terlibat.)

Yang dimaksud dengan hukum yang hidup (*living law*) adalah hukum yang dilaksanakan dalam masyarakat, sebagai hukum yang diterapkan oleh negara.¹³

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, hlm. 20.

¹² R. Otje Salman, *op.cit*, hlm. 37.

¹³ *Ibid*, hlm. 39.

Selanjutnya Ehrlich beranggapan bahwa hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Hukum sendiri tidak akan mungkin efektif, oleh karena ketertiban terletak pada pengakuan sosial terhadap hukum, dan bukan karena penerapannya secara resmi oleh negara.¹⁴

Bagi Ehrlich, tertib sosial didasarkan pada fakta diterimanya hukum yang didasarkan pada aturan dan norma sosial yang tercermin dalam sistem hukum. Secara konsekuen ia beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum harus mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran itu harus ada pada setiap anggota profesi hukum yang bertugas mengembangkan hukum yang hidup (*living law*) dan menentukan ruang lingkup hukum positif dalam hubungannya dengan hukum yang hidup.¹⁵

3. Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog dan pakar ekonomi Jerman. Menurut Weber, analisi hukum dan pranata-pranata hukum di dalamnya mencakup pula konteks historis, politik, dan realitas sosial. Bagi Weber, hukum dipahaminya sebagai suatu kondisi-kondisi faktual yang kompleks dan ditentukan oleh tindakan-tindakan manusia.¹⁶

Weber memandang hukum dalam konteks dan hubungannya dengan sanksi. Hukum baru dapat disebut hukum jika ada jaminan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁵ *Idem*.

¹⁶ Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 215.

eksternal bahwa aturan itu dapat dipaksakan melalui paksaan fisik atau pun psikologis.¹⁷

Weber mengkaji perkembangan hukum dan perkembangan masyarakatnya, di mana konsep dasarnya memandang perkembangan hukum atau pun perkembangan masyarakat selalu bergerak dari yang irasional ke rasional, kemudian transisi dari *substantive rational law* ke *formally rational law*.¹⁸

Dalam masyarakat yang pernah mengenal revolusi, perkembangan masyarakatnya tidak selalu selaras dengan perkembangan hukumnya. Dalam kenyataannya, ada masyarakat yang sebenarnya masih dalam tahapan *charismatic authority*, dengan pemikirannya yang masih *formal irrationality*, tetapi hukum yang mereka perlakukan yang sifatnya sudah berasal dari tahapan rasional.¹⁹

Karakteristik sosiologi hukum semakin jelas jika memerhatikan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:²⁰

“Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep serta pengertian, menentukan subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba tuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak

¹⁷ *Idem*.

¹⁸ *Idem*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 216.

²⁰ Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 12.

ditemukan baik dalam kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain”.

Jadi sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah sebabnya sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya.²¹

B. Objek Kajian Sosiologi Hukum

Di dalam ilmu hukum, hukum sebagai objeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai objeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.²²

Adapun yang menjadi objek utama dari kajian sosiologi hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Achmad Ali yaitu:²³

1. Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar ketaraturannya dapat terwujud. Oleh karena itulah sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan sanksi eksternal (yaitu, sanksi yang dipaksakan oleh pemerintah melalui alat negara);
2. Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai

²¹ *Idem*.

²² *Ibid*, hlm. 8.

²³ *Ibid*, hlm.13.

mahluk sosial yang menyadari eksistensi berbagai kaidah sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu, maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi, sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif;

3. Objek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui disini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum, misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum;
4. Objek bahasan utama dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya.

Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan terjadi di dalam masyarakat dapat direkayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan penggunaan perangkat hukum sebagai alatnya. Dalam kaitan inilah lahirnya konsep *law as tool of social engineering* alias hukum sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat, atau yang istilah kerennya, hukum sebagai alat rekayasa sosial. Konsep ini pertama-tama dikembangkan oleh Roscoe Pound.²⁴

Diperlukan tiga pendekatan dalam memahami fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum, dan pendekatan sosiologis. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka serta asas yang mendasarinya yang dijadikan

²⁴ *Ibid*, hlm. 24.

benar-benar sebagai sumber hukum; pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai nonhukum. Kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan di antara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum). Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum.

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel antara lain pada:²⁵

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial;
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam "*the social world*" mereka;
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum;
4. Tentang bagaimana hukum dibuat;
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum bagaimana pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan bagaimana hukum memengaruhi masyarakat.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm. 25-26.

²⁶ *Ibid*, hlm. 29-30.

Soerjono Soekanto, mengemukakan tentang beberapa persoalan yang disoroti oleh sosiologi hukum sebagai berikut:²⁷

1. Hukum dan sistem sosial masyarakat;
2. Persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum;
3. Sifat hukum yang dualistis;
4. Hukum dan kekuasaan;
5. Hukum dan nilai-nilai sosial budaya;
6. Kepastian hukum dan keadilan;
7. Peranan hukum sebagai alat mengubah masyarakat.

C. Pemusik Jalanan (Pengamen)

1. Definisi

Pengamen berasal dari kata *amen* atau *mengamen* yang berarti berkeliling (menyanyi, bermain musik, dan sebagainya) untuk mencari uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamen berarti penari, penyanyi, atau pemain musik yang tidak tetap tempat pertunjukannya, biasanya mengadakan pertunjukan di tempat umum dengan berpindah-pindah.

Adapun definisi pengamen menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yaitu Pengamen adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan apresiasi seni melalui suatu proses latihan dengan menampilkan karya seni, yang dapat didengar dan dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain merasa terhibur yang kemudian orang lain memberikan jasa atau

²⁷ Lili Rasjidi, 2007, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.37.

imbalan atas kegiatannya itu secara ikhlas.

Semakin hari semakin banyak pengamen yang menghabiskan waktunya untuk bekerja di jalanan dan tempat-tempat umum seperti lampu merah, angkutan umum, pasar, *mall*, taman kota dan sebagainya. Padahal jalanan merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi mereka.²⁸

Pengamen mulai dari anak-anak sampai orang dewasa baik yang dilengkapi alat musik seadanya sampai alat musik lengkap. Pengamen ada yang berpenampilan rapi hingga yang tidak rapi. Yang paling memprihatinkan adalah anak balita yang terpaksa atau dipaksa mengamen untuk membayar setoran yang harus dibayarkan kepada pemasok.

Definisi dan kriteria PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), menyebutkan bahwa pengamen jalanan menghabiskan waktunya untuk mencari uang, berkeliaran di jalan atau tempat-tempat umum lainnya. Pengamen jalanan dianggap sebagai anak nakal, tidak tahu sopan santun, brutal, dan pengganggu ketertiban.²⁹

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Menjadi Pengamen

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak

²⁸ Edi Suharto, 2011, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 231.

²⁹ Kristiana Devi, 2009, *“Interaksi Sosial Pada Pengamen Disekitar Terminal Tirtanadi Surakarta”*, Skripsi, Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm.27.

terjerumus dalam kehidupan di jalanan, seperti: kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua, dan masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Kombinasi dari faktor ini sering kali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah sendiri atau hidup mandiri di jalanan. Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan.³⁰

Menurut hasil penelitian Artidjo Alkaster tentang potret Anak jalanan yang bekerja sebagai pengamen menyatakan bahwa yang menyebabkan menuju kearah kehidupan jalanan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Faktor Internal meliputi: kemalasan, tidak mau bekerja keras, tidak kuat mental, cacat fisik dan psikis, adanya kemandirian hidup untuk tidak bergantung kepada orang lain;
- b. Faktor Eksternal meliputi:
 1. Faktor ekonomi: pengamen dihadapkan kepada kemiskinan keluarga dan sempitnya lapangan pekerjaan yang ada;
 2. Faktor geografis: kondisi tanah tandus dan bencana alam yang tak terduga;
 3. Faktor sosial: akibat arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota tanpa disertai partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;
 4. Faktor pendidikan: rendahnya tingkat pendidikan dan tidak memiliki keterampilan kerja;
 5. Faktor psikologis: adanya keretakan keluarga yang menyebabkan anak tidak terurus;
 6. Faktor kultural: lebih bertendensi pasrah kepada nasib dan hukum adat yang membelenggu;
 7. Faktor lingkungan: anak dari keluarga pengamen telah mendidik anak menjadi pengamen pula;
 8. Faktor agama: kurangnya pemahaman agama, tipisnya iman

³⁰ Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 196.

³¹ Kristiana Devi, *op.cit*, hlm. 28-29.

dan kurang tabah dalam menghadapi cobaan hidup.

Menurut Pungki, faktor-faktor munculnya anak jalanan adalah:³²

- a. Banyaknya fasilitas umum di kota besar yang menawarkan kemudahan seperti; pusat kegiatan perdagangan jasa, transportasi, hiburan, kesenian, perkantoran yang merupakan faktor penarik dari kota tersebut, sehingga membuat semua orang tertarik termasuk anak jalanan;
- b. Faktor lingkungan keluarga yang diwarnai oleh ketidakharmonisan, baik perceraian, percekocokan, kehadiran orang tua tiri;
- c. Faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mendukung memaksa setiap anggota keluarga untuk mencari penghasilan dan nafkah sendiri;
- d. Faktor pendidikan yang rendah, sangat mudah bagi anak untuk terjerumus ke jalan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pengamen adalah adanya dua faktor, yaitu internal dan eksternal dimana faktor internal antara lain kemalasan, dan bahkan kemandirian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bergantung dengan orang lain, dan faktor eksternal yaitu meliputi kondisi ekonomi keluarga yang lemah yang dialami oleh orang tua, kondisi kehidupan keluarga yang kurang harmonis, lingkungan, kultural dan pendidikan.³³

3. Karakteristik Pengamen

Berikut ini adalah macam-macam pengamen:³⁴

- a. Pengamen baik

³² Pendapat Pungki dikutip dari Kristiana Devi, 2009, *"Interaksi Sosial Pada Pengamen Disekitar Terminal Tirtonadi Surakarta"*, Skripsi, Sarjana Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 29.

³³ *Ibid*, hlm. 29-30.

³⁴ *Ibid*, hlm. 30-32.

Pengamen yang baik adalah pengamen profesional yang memiliki kemampuan musikalitas yang mampu menghibur sebagian besar pendengarnya. Para pendengar pun merasa terhibur dengan nyanyian pengamen yang baik sehingga mereka tidak sungkan untuk memberi uang receh maupun uang besar untuk pengamen jenis ini. Pengamen ini pun sopan dan tidak memaksa dalam meminta uang.

b. Pengamen pengemis

Pengamen ini tidak memiliki musikalitas sama sekali dan permainan musik maupun vokal pun sesuka hatinya/seenak hatinya. Setelah mengamen mereka tetap menarik uang receh dari para pendengarnya. Dibanding mengamen mereka lebih mirip pengemis karena hanya bermodal dengan nekat saja dalam mengamen serta hanya berbekal belas kasihan dari orang lain dalam mencari uang.

c. Pengamen pemalak/penebar teror

Pengamen yang satu ini adalah pengamen yang lebih suka melakukan teror kepada para pendengarnya sehingga para pendengar merasa lebih baik memberikan uang receh daripada mereka menjadi korban oleh pengamen tukang palak tersebut. Mereka tidak hanya menyanyi tetapi kadang hanya membacakan puisi-puisi yang menebar teror dengan pembawaan yang meneror kepada para pendengar. Pengamen

jenis ini biasanya akan memaksa diberi uang dari tiap pendengar dengan modal teror. Pengamen semacam ini layak dilaporkan ke polisi dengan perbuatan tidak menyenangkan di depan umum.

d. Pengamen penjahat

Pengamen yang penjahat adalah pengamen yang tidak hanya mengamen tetapi juga melakukan tindakan kejahatan seperti sambil mencopet, sambil menodong, menganiaya orang lain, melecehkan orang lain, dan lain sebagainya.

e. Pengamen cilik/anak-anak

Pengamen jenis ini ada yang bagus tetapi ada juga yang sangat tidak enak untuk didengar. Yang tidak enak didengar inilah yang lebih cenderung mengemis daripada mengamen. Akan tetapi bagaimanapun juga mereka hanya anak-anak bocah cilik yang menjadi korban situasi dari orang-orang jahat dan tidak kreatif di sekitarnya. Pengamen anak ini bisa dipaksa menjadi pengamen oleh orang tua, oleh preman, dan sebagainya namun juga ada yang atas kemauan sendiri dengan berbagai motif. Sebaiknya jangan diberi uang agar tidak ada anak-anak yang menjadi pengamen. Mereka seharusnya tidak berada di jalanan.

D. Kejahatan

Definisi kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.³⁵

Apabila dipandang dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.³⁶

Kejahatan adalah perbuatan manusia (anggota masyarakat) yang melanggar norma hukum dari masyarakat yang bersangkutan dan merupakan perbuatan yang dirasakan, merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (harus ditindak sesuai ketentuan hukum pidana). Ilmu yang khusus mempelajari kejahatan sebagai sarana untuk menanggulangnya dinamakan Kriminologi.³⁷

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:³⁸

³⁵ A.S.Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, hlm.16.

³⁶ *Ibid*, hlm.17.

³⁷ Soedjono D, 1985, *Sosiologi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.170.

³⁸ Ninik Widiyanti, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, hlm. 42-44.

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian(*harm*);

Sebelum suatu perbuatan dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau menimbulkan kerugian. Suatu kejahatan mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan masyarakat.

2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kerugian haruslah dilarang oleh undang-undang, haruslah dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.

3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);

Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.

4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);

Maksud jahat atau *mens rea* adalah usaha sengaja yang nyata untuk mencapai suatu tujuan dengan pengertian motif, ialah pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan untuk mencapai maksud atau tujuan yang diinginkan. *Mens rea* adalah intensional itu bukannya motivasi. Motif-motif untuk melakukan sesuatu kejahatan mungkin saja baik akan tetapi maksudnya itu sendiri mungkin suatu maksud untuk menimbulkan suatu kerugian yang dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah suatu maksud jahat.

5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;

Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan satu hubungan kejadian di antara *means rea* dengan *conduct* (*perilaku*).

6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;

Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan *misconduct* yang *voluntary* (dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain).

7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang. Tidak hanya kerugian itu harus dijelaskan secara tegas oleh undang-undang dan ditunjukkan dengan jelas ancaman hukuman terhadap para pelanggar.

Ilmu sosiologi berpendapat bahwa kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. Analisa terhadap kondisi-kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua pendapat yaitu bahwa terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan itu terjadi. Maka angka-angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat dan

kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi-kondisi dan proses-proses seperti misalnya gerak sosial, persaingan serta pertentangan kebudayaan; ideologi politik, agama dan ekonomi; kepadatan dan komposisi penduduk; dan distribusi kekayaan, pendapatan dan pekerjaan.³⁹

Kemudian, para sosiolog hukum berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seorang menjadi penjahat. Analisa ini bersifat sosial psikologis; beberapa orang ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti misalnya imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, *self-conception*, dan kekecewaan yang agresif, sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Sehubungan dengan pendekatan sosiologi tersebut diatas, dapat ditemukan teori-teori tentang perilaku jahat. Salah satu diantara sekian teori-teori tersebut adalah dari E.H. Sutherland yang mengatakan bahwa seseorang mendapatkan pola-pola perilaku yang jahat dengan cara yang sama dengan cara untuk mendapatkan pola-pola perilaku yang tidak jahat. Artinya, perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperikelakuan dengan kecenderungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada. Sutherland menyebutkannya sebagai proses asosiasi yang diferensial, oleh karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut

³⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 288.

sebagai akibat interaksi dengan pola-pola perilaku jahat, berbeda dengan apa yang dipelajari dalam proses interaksi dengan pola-pola perilaku yang tidak suka pada kejahatan. Apabila seseorang menjadi jahat, maka hal itu disebabkan oleh karena orang tadi mengadakan kontak dengan pola-pola perilaku jahat dan juga karena dia mengasingkan diri terhadap pola-pola perilaku yang tidak menyukai kejahatan.⁴⁰

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:⁴¹

1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).
3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori ini dijelaskan, sebagai berikut:

1. *Anomie* atau *Strain*

Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merosot, dimana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 289.

⁴¹ A.S. Alam, *op.cit*, hlm. 45.

bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomie. Durkheim mempercayai bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas yang ketat untuk kemampuan manusia.⁴²

Seperti halnya Durkheim, Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie* tetapi konsepsi Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan konsepsi *anomie* Durkheim. Masalah sesungguhnya, menurut Merton, tidak diciptakan oleh *sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) tetapi oleh *social structure* (struktur sosial) yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk mencapainya. Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Merton meminjam istilah "*anomie*" dari Durkheim guna menjelaskan keruntuhan sistem norma ini.⁴³

2. *Cultural Deviance* (Penyimpangan Budaya)

Teori penyimpangan budaya ini memusatkan perhatian kepada kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. *Cutural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan

⁴² Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 57.

⁴³ Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 61.

tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.⁴⁴

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, adalah:

a. *Social disorganization*.

Social disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasikan nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrilisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.⁴⁵

b. *Differential association*.

E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut *Differential Association Theory* sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut:⁴⁶

- 1) *Criminal behavior is learned* (tingkah laku kriminal dipelajari);
- 2) *Criminal behavior is learned in interaction with other person in process of communication* (tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi);
- 3) *The principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat);
- 4) *When criminal behavior is learned, the leaning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalizations and attitude* (ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap);
- 5) *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari

⁴⁴ A.S.Alam, *op.cit*, hlm. 54.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 67.

⁴⁶ A.S.Alam, *op.cit*, hlm. 56-58.

melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia atau tidak);

- 6) *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law* (seseorang yang menjadi penjahat karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);
- 7) *Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (asosiasi diferensial itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya);
- 8) *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning process* (proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar);
- 9) *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan-kebutuhan dan nilai umum tersebut, karena tingkah laku nonkriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama).

Makna Teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 58.

c. *Cultural conflict*.

Sementara *culture conflict theory* menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.⁴⁸

Tokohnya yang terkenal adalah Thorsten Sellin dimana ia mengatakan *conduct norm* merupakan aturan yang merefleksikan sikap-sikap dari kelompok yang masing-masing dari kita memilikinya.⁴⁹

3. *Social Control* (Kontrol Sosial)

Pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.⁵⁰

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Teori ini berusaha menjelaskan kenakalan pada remaja. Adapun yang dimaksud dengan deviasi primer adalah individu yang:⁵¹

- a. Melakukan deviasi secara periodik/kadang-kadang/jarang-jarang;

⁴⁸ Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 68.

⁴⁹ Wahyu Muljono, *op.cit*. hlm. 58-59.

⁵⁰ A.S.Alam, *op.cit*, hlm.67.

⁵¹ Wahyu Muljono, *Loc.cit*.

- b. Melakukan tanpa diorganisasi;
- c. Si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar;
- d. Pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

F. Perubahan Sosial

Adapun definisi perubahan sosial antara lain dikemukakan oleh

T.B. Bottomore bahwa perubahan sosial adalah:⁵²

“... A change in social structure (including here changes in the size of society), or in particular social institutions, or in the relationship between institutions.”

(“...Sebuah perubahan dalam struktur sosial (termasuk di sini perubahan dalam ukuran masyarakat), atau dalam lembaga sosial tertentu, atau dalam hubungan antara lembaga.”)

Hukum, termasuk penyimpangannya yang kita kenal sebagai kejahatan; sebagai fenomena sosial terpaksa tunduk pada teori-teori perubahan sosial yang dikenal di dalam sosiologi.⁵³

Salah satu penyebab meningkatnya kriminalitas adalah terjadinya perubahan sosial, dan salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penambahan maupun pengurangan penduduk. Salah satu perwujudan dari penambahan penduduk di perkotaan adalah urbanisasi.⁵⁴

Pertambahan penduduk dilihat dari banyaknya para pengamen, pengemis, pedagang kaki lima, pemulung dan lain sebagainya. Bertambahnya penduduk akibat urbanisasi ini tentu saja akan berkaitan dengan bertambahnya bentuk-bentuk penyimpangan. Misalnya, peraturan tentang ketertiban umum melarang para pengamen untuk mengemis.

⁵² Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 201.

⁵³ Achmad Ali, *op.cit*, hlm. 188.

⁵⁴ *Idem*.

Terlihat jelas bahwa urbanisasi telah memberikan dampak terhadap jumlah penduduk dan jumlah bentuk penyimpangan.⁵⁵

Salah satu produk negatif dari urbanisasi adalah munculnya daerah-daerah kumuh atau miskin diperkotaan. Daerah-daerah kumuh itu sekaligus merupakan daerah-daerah rawan yang mengandung potensi yang cukup tinggi dalam melahirkan kriminalitas. Munculnya daerah kumuh merupakan akibat perebutan di perkotaan yang tentu saja senantiasa memunculkan golongan berduit sebagai pemenang, sedangkan golongan tak berduit tersingkir ke pinggiran yang kemudian membentuk daerah-daerah kumuh.⁵⁶

Tingginya kecenderungan kriminalitas di kalangan orang tak berduit di perkotaan, apalagi yang menjadi penghuni daerah-daerah kumuh, bukan sekadar sebagai kebutuhan langsung untuk menyambung hidup, misalnya terpaksa merampok dan menganiaya atau membunuh korban, sekadar agar dapat makan dan minum. Kriminalitas perkotaan juga disebabkan oleh berbagai faktor psikologis sebagai akibat kemiskinan yang menyengsarakan.⁵⁷

Kurangnya pengawasan orang tua, penolakan orang tua, dan hubungan orang tua-anak yang jelek adalah penyebab utama perilaku delinkuen anak. Anak-anak dari keluarga bermasalah (*broken-home*) lebih banyak yang ditangkap, dituntut, dan dipidana. Keretakan keluarga dapat

⁵⁵ Jokie M.S. Siahaan, 2009, *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*, PT Indeks, Jakarta, hlm. 61.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 192.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 194

memengaruhi adaptasi anak terhadap perilaku menyimpang karena berkurangnya pengawasan terhadap anak, sehingga anak dapat melakukan kontak dengan berbagai norma menyimpang dalam komunitas.⁵⁸

Proses sosial di kota-kota besar mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan karena berbagai masalah antara lain masalah urbanisasi, industrialisasi, kemajuan teknologi yang menyebabkan adanya mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal yang tinggi, sedangkan semua itu akan mempertemukan manusia-manusia dari berbagai masyarakat, suku, dan bangsa. Di kota modern, masing-masing dengan membawa ikatan norma-norma/nilai-nilai yang hidup yang saling berbeda ataupun bertentangan satu sama lain. Suasana ini selain menimbulkan *culture conflict*, juga bisa menimbulkan kebingungan dimana orang karena banyaknya norma-norma/nilai-nilai hidup yang sekaligus berlaku disuatu tempat, sehingga berpegangan kepada norma-norma/nilai-nilai hidup yang akhirnya pola hidup menjadi samar-samar.⁵⁹

⁵⁸ Jokie M.S. Siahaan, *op.cit*, hlm. 61.

⁵⁹ Ninik Widiyanti, *op.cit*, hlm. 117.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polsek Ujung Pandang dan Dinas Sosial Kota Makassar. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian tersebut karena tersedianya data yang diperlukan disebabkan Kota Makassar merupakan kota metropolitan yang jumlah pengamennya lebih mudah ditemukan di beberapa persimpangan jalan dan tempat-tempat umum.

B. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan cara untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data yang diharapkan, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh penulis kepada responden untuk menggali informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara bebas, namun tetap mengacu pada data atau informasi yang diperlukan dengan menggunakan pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang perlu ditanyakan.

Penulis melakukan wawancara dengan bagian reseksi kriminal, bagian humas, dan kepala seksi bidang anak jalanan.

2. Penelitian Pustaka

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan Penulis melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis menggunakan literatur berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua jenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi.

D. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskripsi kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Metode deduktif, artinya bahwa penelitian dimulai dari hal-hal yang umum sampai ke khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Makassar

Nama Makassar sudah disebutkan dalam pupuh 14/3 kitab Nagarakretagama karya Mpu Prapanca pada abad ke-14, sebagai salah satu daerah taklukan Majapahit. Walaupun demikian, Raja Gowa ke-9 Tumaparisi Kallonna (1510-1546) diperkirakan adalah tokoh pertama yang benar-benar mengembangkan kota Makassar. Ia memindahkan pusat kerajaan dari pedalaman ke tepi pantai, mendirikan benteng di muara Sungai Jeneberang, serta mengangkat seorang syahbandar untuk mengatur perdagangan.

Pada Abad ke-16, Makassar menjadi pusat perdagangan yang dominan di Indonesia Timur, sekaligus menjadi salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Raja-raja Makassar menerapkan kebijakan perdagangan bebas yang ketat, di mana seluruh pengunjung ke Makassar berhak melakukan perniagaan disana dan menolak upaya VOC (Belanda) untuk memperoleh hak monopoli di kota tersebut. Masjid di Makassar (1910-1934).

Selain itu, sikap yang toleran terhadap agama berarti bahwa meskipun Islam semakin menjadi agama yang utama di wilayah tersebut, pemeluk agama Kristen dan kepercayaan lainnya masih tetap dapat berdagang di Makassar. Hal ini menyebabkan Makassar menjadi pusat yang penting bagi orang-orang Melayu yang bekerja dalam perdagangan

di kepulauan Maluku dan juga menjadi markas yang penting bagi pedagang-pedagang dari Eropa dan Arab. Semua keistimewaan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan Raja Gowa-Tallo yang memerintah saat itu (Sultan Alauddin, Raja Gowa dan Sultan Awalul Islam, Raja Tallo).

Kontrol penguasa Makassar semakin menurun seiring semakin kuatnya pengaruh Belanda di wilayah tersebut dan menguatnya politik monopoli perdagangan rempah-rempah yang diterapkan Belanda melalui VOC. Pada tahun 1669, Belanda, bersama dengan La Tenri Tatta Arung Palakka dan beberapa kerajaan sekutu Belanda melakukan penyerangan terhadap kerajaan Islam Gowa-Tallo yang mereka anggap sebagai Batu Penghalang terbesar untuk menguasai rempah-rempah di Indonesia timur. Setelah berperang habis-habisan mempertahankan kerajaan melawan beberapa koalisi kerajaan yang dipimpin oleh Belanda, akhirnya Gowa-Tallo (Makassar) terdesak dan dengan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya.

Makassar merupakan kota yang multi etnis. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar dan Suku Bugis sisanya berasal dari suku Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

Salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah Mappalili. Mappalili (Bugis) atau Appalili (Makassar) berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya.

Mappalili atau Appalili adalah ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat dari Kabupaten Pangkep terutama Mappalili adalah bagian dari budaya yang sudah diselenggarakan sejak beberapa tahun lalu. Mappalili adalah tanda untuk mulai menanam padi.

Tujuannya adalah untuk daerah kosong yang akan ditanam, disalipuri (Bugis) atau dilebbu (Makassar) atau disimpan dari gangguan yang biasanya mengurangi produksi.

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Yang Dilakukan Pemusik Jalanan (Pengamen) di Kota Makassar.

1. Data Kasus Kejahatan oleh Pengamen di Kota Makassar

Tabel 1.
Jumlah Pengamen di Kota Makassar

NO	TAHUN	JUMLAH PENGAMEN
1	2013	117
2	2014	105
3	2015	91

Sumber: Bidang Rehabilitasi Sosial Tahun 2016

Tabel 2.
Jumlah Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen

NO	TAHUN	JUMLAH KEJAHATAN
1	2013	8
2	2014	6
3	2015	17

Sumber: Polsek Ujung Pandang Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pengamen yang ada di Kota Makassar semakin mengalami penurunan di tiap tahunnya sedangkan jumlah kejahatan yang dilakukan pengamen mengalami naik turun yaitu pada Tahun 2013 sebesar 8 kejahatan lalu menurun pada Tahun 2014 yaitu 6 kejahatan kemudian naik lagi sebesar 17 kejahatan pada Tahun 2015. Kejahatan yang dilakukan pun bermacam-macam seperti pencurian, penganiayaan, pemalakan, membawa benda tajam (badik & busur), menyerang petugas dengan busur, dan pemakaian obat-obatan daftar G yang menyebabkan kecanduan atau menghirup lem fox. Kebanyakan perkara kejahatan tersebut berakhir dengan damai karena korban merasa takut kepada pelaku. Tidak ingin terjadi kejadian yang sama lagi apabila bertemu kembali.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bripka Hendra H. Susanto, S.H bagian Reserse Kriminal Polsek Ujung Pandang pada tanggal 19 Februari 2016.

Berikut adalah tabel jenis-jenis kejahatan yang dilakukan pengamen di Kota Makassar selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Mulai dari Tahun 2013-2015.

Tabel 3.
Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2013

No.	Tanggal	Kasus	TKP	Pasal Yang Dilanggar
1	12 Mei 2013	Telah terjadi penganiayaan dengan cara ditusuk menggunakan badik.	Jalan Penghibur, Pantai Losari.	351 KUHP
2	23 Mei 2013	Telah terjadi penganiayaan terhadap pengunjung pantai losari.	Anjungan Pantai Losari.	351 KUHP
3	24 Juni 2013	Korban di pukul secara bersama-sama.	Anjungan Pantai Losari.	170, 351 KUHP
4	25 Agustus 2013	Pelaku bersama teman-temannya mengeroyok korban dan menikam korban dengan senjata tajam.	Jalan Penghibur, Pantai Losari.	170, 351 KUHP
5	30 September 2013	Korban di pukul oleh pelaku sebanyak 1 kali menggunakan kepalan tangan serta mengancam dengan menggunakan balok kayu.	Jalan Penghibur, Anjungan.	351 KUHP
6	14 Oktober 2013	Pelaku bersama teman-temannya mengeroyok korban karena tidak mau memberikan uang mengamen.	Jalan Penghibur, Anjungan.	170, 351 KUHP

7	15 Desember 2013	Korban sementara memarkir sepeda motor di anjungan tiba-tiba di serang oleh sekelompok laki-laki dan langsung menikam korban dan mengenai sebelah tangan korban.	Jalan Penghibur, Anjungan.	351 KUHP
---	------------------	--	----------------------------	----------

Sumber: Polsek Ujung Pandang Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2013 terdapat 2 macam kejahatan yang dilakukan oleh pengamen berupa penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Tabel 4.

Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2014

No.	Tanggal	Kasus	TKP	Pasal Yang Dilanggar
1	2 Maret 2014	Korban dipukul pada bagian wajah oleh pelaku.	Taman Benteng Rotterdam.	351 KUHP
2	21 Mei 2014	Pelaku mengejar korban dengan menggunakan parang sehingga korban mengalami robek di bagian punggung sebelah kiri.	Jalan Penghibur.	351 KUHP
3	30 Mei 2014	Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok korban.	Jalan Penghibur.	170, 351 KUHP
4	13 Juli 2014	Korban ditempeleng dan dibakar tangan kanan dengan rokok.	Jalan Penghibur Anjungan.	351 KUHP
5	27 September 2014	Pelaku memukul korban dengan menggunakan tangan dan mengenai wajah korban.	Jalan Penghibur.	351 KUHP

6	1 Oktober 2014	Korban bersama temannya datang ke anjungan kemudian pelaku mengeroyok korban serta menusuk korban menggunakan busur.	Jalan Penghibur, anjungan.	170, 351 KUHP
---	----------------	--	----------------------------	---------------

Sumber: Polsek Ujung Pandang Tahun 2015

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2014 juga terdapat 2 jenis kejahatan yang dilakukan pengamen yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama dan penganiayaan. Tetapi pada Tahun 2014 terjadi penurunan jumlah kejahatan yang terjadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.

Jenis-jenis Kejahatan Yang Dilakukan Pengamen Tahun 2015

No.	Tanggal	Kasus	TKP	Pasal Yang Dilanggar
1	31 Januari 2015	Pelaku tertangkap tangan membawa badik oleh saksi.	Jalan Penghibur, Losari	UU Darurat
2	26 Februari 2015	Pelaku tertangkap tangan membawa senjata jenis badik.	Jalan Penghibur, Anjungan	UU Darurat
3	15 Maret 2015	Pelaku memukul korban menggunakan kunci motor dibagian kepala korban sehingga kepala korban bengkak.	Jalan Penghibur, Anjungan Losari	351 KUHP
4	19 April 2015	Pelaku telah mengeroyok korban dengan cara menikam korban di bagian punggung dan pantat.	Jalan Penghibur, Anjungan Mandar Toraja	170, 351 KUHP

5	17 Mei 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban yang disimpan di saku jaket korban.	Jalan Penghibur, Anjungan Losari	362 KUHP
6	27 Juni 2015	Sepeda motor korban hilang pada saat diparkir di Anjungan Pantai Losari.	Jalan Penghibur, Anjungan Pantai Losari	363 KUHP
7	28 Juni 2015	Pelaku tiba-tiba mendatangi korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan dan gelas.	Jalan Penghibur	170, 351 KUHP
8	25 Juli 2015	Korban sementara bercerita dengan pelaku pada saat itu korban disuruh masukkan portal tanda masuk dan pelaku emosi dan memukul korban.	Jalan Penghibur	351 KUHP
9	26 Juli 2015	Pelaku mencakar dan menusuk bagian punggung belakang dengan memakai kunci motor.	Jalan Penghibur, Anjungan Losari	351 KUHP
10	1 Agustus 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban yang tersimpan di dalam tas korban pada saat acara di Anjungan.	Jalan Penghibur, Anjungan	362 KUHP
11	2 Agustus 2015	Pelaku mengambil dompet dan dua buah <i>handphone</i> korban pada saat korban shalat isya.	Jalan Penghibur, Mesjid Terapung	362 KUHP
12	16 Agustus 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban pada saat korban mengikuti kegiatan di tempat kejadian perkara dan tanpa sengaja perbuatan pelaku tertangkap kamera rekan korban.	Jalan Penghibur, Anjungan Losari	362 KUHP
13	24 September 2015	Pelaku mengambil barang-barang korban yang disimpan dibawah sadel motor korban yang terparkir di tempat kejadian perkara.	Jalan Penghibur, Anjungan Toraja mandar	363 KUHP

14	3 Oktober 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban yang di simpan di bagasi depan motor korban.	Jalan Penghibur, KFC Losari	363 KUHP
15	25 Oktober 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban yang di simpan di saku celana korban.	Jalan Penghibur, Anjungan Bugis Makassar	362 KUHP
16	25 Oktober 2015	Pelaku mengambil <i>handphone</i> korban yang di simpan di kantong jaket korban.	Jalan Penghibur, Samping Mesjid Terapung	362 KUHP
17	5 November 2015	Pelaku memukul dan menampar wajah korban dan menusuk pinggang korban dengan senjata.	Jalan Penghibur, Samping Mesjid Terapung	351 KUHP

Sumber: Polsek Ujung Pandang Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 4 jenis kejahatan yang terjadi yaitu kepemilikan benda tajam (badik & busur), penganiayaan, kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan pencurian. Tahun 2015 merupakan tahun dengan angka kejahatan tertinggi yang dilakukan oleh pengamen.

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Oleh Polsek Ujung Pandang

Ada dua macam upaya yang dilakukan Polsek Ujung Pandang dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan pengamen yaitu:⁶¹

- a. Upaya pencegahan yaitu pihak kepolisian melakukan pendataan terhadap pengamen, lalu diberikan pengarahan terkait larangan berbuat tindak kriminal. Kepolisian juga

⁶¹ *Idem.*

bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Kelurahan. Mereka juga biasanya mengadakan posko bersama di Pantai Losari.

- b. Upaya tindak lanjut, apabila ada laporan maka pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

3. Upaya Penanggulangan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar

Dalam melakukan upaya pembinaan dinas sosial dibantu oleh instansi terkait yaitu:

A. Lembaga Pemerintahan:

1. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Polsek Ujung Pandang;
4. Panti Sosial Marsudi Putra;
5. Panti Sosial Bina Remaja Maros;
6. Rumah Perlindungan Sosial Anak;
7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
8. Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna NAPZA.

B. Lembaga Non Pemerintahan:

1. Yayasan Pabbata Umami (YAPTA-U);
2. Yayasan Peduli Pemulung (YAPEM);
3. Yayasan An-Nur;
4. Kelompok Penyanyi Jalanan;

5. Aksi Indonesia Muda.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar menjelaskan bahwa ada tiga upaya pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial yaitu pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial.

a) Pembinaan Pencegahan

Pembinaan pencegahan diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Pembinaan pencegahan dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mencegah berkembangnya dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya anak di jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan ini meliputi:

1. Pendataan;

Pendataan dilakukan untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi antara anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berisi nama, alamat, daftar sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi.

2. Pemantauan, pengendalian dan pengawasan;

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-

sumber atau penyebab munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar;
- b. Memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang melakukan aktifitas di tempat umum, secara perseorangan, keluarga maupun secara berkelompok.

3. Sosialisasi;

Sosialisasi dilakukan oleh instansi terkait, meliputi:

- a. Sosialisasi secara langsung dilakukan oleh Dinas Sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial (Orsos) melalui kegiatan interaktif dan ceramah;
- b. Sosialisasi secara tidak langsung dapat melalui media cetak maupun media elektronik.

4. Kampanye.

Kampanye bertujuan untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kampanye dilakukan melalui kegiatan yang mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk pertunjukan,

pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

b) Pembinaan Lanjutan

Pembinaan lanjutan diatur dalam Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Pembinaan Lanjutan dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan;

Perlindungan dilakukan untuk menghalangi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan (*in the street*) dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, lembaga sosial masyarakat. Pelaksanaan Posko tidak dilakukan tindakan penangkapan akan tetapi dilakukan tindakan pengungkapan masalah berdasarkan situasi

dan kondisi pada saat dilakukan kegiatan posko tersebut.

2. Pengendalian sewaktu-waktu;

Pengendalian sewaktu-waktu dilaksanakan oleh tim terpadu terdiri dari Dinas Sosial, unsur Satpol PP dan dapat dengan unsur POLRI. Kegiatan ini dilakukan secara koordinatif dengan instansi terkait terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

3. Penampungan sementara;

Penampungan sementara adalah pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah yang dimaksud. Penampungan sementara yang dimaksud dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (*outbound*).

4. Pendekatan awal;

Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan. Identifikasi dan seleksi digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya.

5. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*);

Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) bertujuan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Masalah dan kebutuhan tersebut dibahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dijadikan sebagai data permanen bagi setiap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Data tersebut akan digunakan untuk pemantauan dan pembinaan selanjutnya. Lalu, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dibahas dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

6. Pendampingan sosial;

Pendampingan sosial dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. Pendampingan ini juga dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

7. Rujukan.

Rujukan meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta di proses secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

c) Usaha Rehabilitasi Sosial

Usaha untuk memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar. Sasaran

usaha rehabilitasi sosial adalah:

1. Anak jalanan usia produktif;
2. Anak jalanan usia balita;
3. Anak jalanan usia sekolah;
4. Gelandangan psikotik;
5. Gelandangan usia lanjut;
6. Pengemis usia produktif;
7. Pengemis usia lanjut;
8. Pengemis eks kusta;
9. Pengemis yang mengatasnamakan Lembaga Sosial atau Panti Asuhan;
10. Pengamen yang beraktifitas di jalanan.

Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar menjelaskan bahwa usaha rehabilitasi sosial diperuntukkan bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan dimaksudkan untuk memberikan peluang dan kesempatan untuk memperoleh aktifitas yang bersifat produktif dan penyaluran bakat seni, sehingga tercipta keteraturan dan kedisiplinan hidup. Upaya tersebut berupa:

- a. Bimbingan mental spiritual;
Bimbingan mental spiritual dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku bagi pengamen agar tidak

melakukan aktivitas di jalanan.

b. Bimbingan sosial;

Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada penerima pelayanan agar tidak melakukan aktivitas di jalanan.

c. Bimbingan hukum;

Bimbingan hukum ini dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan dapat mengetahui bahwa aktifitas mereka mengamen di jalanan, mengganggu ketertiban umum.

d. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;

Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan dilakukan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai kemampuan yang mereka miliki.

e. Bantuan stimulasi;

Bantuan stimulasi dilakukan untuk menumbuhkan keinginan berusaha agar dapat menciptakan kemandirian usaha sehingga dapat hidup secara layak.

f. Pendidikan non formal (paket a,b,c);

Pendidikan non formal (Paket A,B,C) dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada pengamen yang putus sekolah dan masih memiliki keinginan untuk memperoleh pendidikan formal.

g. Pembinaan pola kemitraan usaha;

Pembinaan pola kemitraan usaha dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan kesempatan bagi *stakeholder* baik secara individu, kelompok, lembaga, perusahaan dan masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan kewirausahaan dan bakat seni yang dimiliki pengamen.

h. Pelatihan pengembangan bakat seni.

Pelatihan pengembangan bakat seni sebagai proses untuk melatih dan mengembangkan bakat seni pengamen baik secara individu maupun kelompok dalam kegiatan klinik musik dan/atau pertunjukan yang dapat dijadikan sebagai kompetisi untuk menambah wawasan, kemampuan dan kualitas musik.

Pada Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dijelaskan bahwa ada upaya pembinaan lanjutan yaitu bimbingan lanjut terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, eks kusta dan keluarga yang telah mendapat pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial dilaksanakan untuk monitoring dan evaluasi hasil kinerja secara terencana dan berkesinambungan. Bimbingan lanjut ini dilakukan melalui kegiatan monitoring evaluasi dengan cara kunjungan rumah. Bimbingan lanjut ini menjadi rujukan untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha dan

pengembangan kemandirian.

Pasal 47 menjelaskan tentang larangan kepada setiap orang atau kelompok dilarang melakukan aktifitas mengamen di jalanan, kecuali tempat umum yang direkomendasikan oleh Walikota. Kemudian pada Pasal 49 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dipertegas bahwa setiap orang atau sekelompok orang dilarang menggunakan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi jalan dan/atau menyelenggarakan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu atau patut di duga dapat mengganggu keselamatan, keamanan atau kelancaran lalu lintas.

Pada perda ini juga dijelaskan tentang sanksi bagi pengamen yang melakukan pelanggaran dengan melakukan aktifitas di jalanan. Sanksi tersebut diatur pada Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yaitu:

- (1).Pelanggaran atas ketentuan pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi berupa denda dan/atau ancaman hukuman kurungan bagi pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan;
- (2).Pembinaan bagi pengamen juga dapat dilakukan dengan cara interogasi, identifikasi, dan shock terapi serta membuat perjanjian yang mengikat agar mereka tidak melakukan

kegiatan mengamen di jalanan yang disaksikan oleh aparat dan/atau petugas dan perjanjian dimaksud dapat dijadikan sebagai barang bukti di Pengadilan yang dapat memberatkan pengamen dimaksud;

(3).Sanksi kepada pengamen yang mengamen di jalanan dilakukan penyitaan peralatan musik dan dapat dilakukan pemusnahan;

(4).Penyitaan peralatan musik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dapat dikembalikan kepada pengamen yang bersangkutan;

(5).Setiap pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang ditemukan di jalanan yang melakukan kegiatan mengamen akan dikenakan hukuman pembinaan dalam panti rehabilitasi sosial selama 10 (sepuluh) hari;

(6).Pengamen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui sistem panti dan luar panti paling lama 3 (tiga) bulan setelah mendapat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

(7).Pengamen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) Pasal ini yang terkena razia untuk ketiga kalinya dapat dikenakan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

(8). Proses hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pasal ini

dilakukan oleh aparat hukum.

Pemerintah Kota Makassar juga telah melakukan upaya pembinaan terhadap pengamen dengan mendirikan Kelompok Penyanyi Jalanan atau biasa di sebut KPJ yang merupakan komunitas yang bergerak di bidang kesenian dan diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk menyalurkan bakat mereka di beberapa acara yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar. Mereka biasa tampil mengisi acara di hotel-hotel, diberikan pelatihan dalam bermusik sehingga penampilannya dapat dikemas dengan lebih bagus lagi serta diberikan fasilitas berupa sekretariat yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin No. 1.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Oleh Pengamen

Data dari dinas sosial juga menyebutkan bahwa beberapa dari pengamen juga menggunakan obat-obatan dan banyak dari mereka yang di bina oleh dinas sosial di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahguna NAPZA agar dapat di rehabilitasi untuk menghilangkan rasa kecanduannya. Kebanyakan dari mereka adalah remaja. Ada juga yang dibina di Panti Sosial Marsudi Putra dan khusus bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen yang berada dibawah umur dan melakukan tindak kriminal.⁶²

Adapun faktor penyebab kejahatan yang dilakukan pengamen yaitu:

1. Tersinggung apabila ia telah mengamen dan tidak dibayar;

⁶² Hasil wawancara dengan Drs. H. Mas'ud, S. MM Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada tanggal 2 Februari 2016.

2. Pembelaan diri karena takut terjaring razia (dalam hal kepemilikan benda tajam seperti badik & busur);
3. Sudah tidak memiliki penghasilan lagi jadi terpaksa melakukan tindak kriminal;
4. Lingkungan yang sangat mendukung bagi para pengamen untuk saling mempengaruhi satu sama lain untuk melakukan kejahatan;
5. Kurangnya pemahaman agama sehingga mereka tidak takut melakukan kejahatan.

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan pada bab 2 bagian e mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan, dapat dilihat kenyataannya di masyarakat bahwa ketiadaan norma, penyimpangan budaya dan kontrol sosial sangat mendukung seseorang untuk melakukan tindak kriminalitas.

Dapat dilihat pada faktor pertama penyebab kejahatan yang disebabkan oleh pengamen mengandung teori *anomie* di dalamnya sebagaimana dijelaskan bahwa kekurangpaduan antara apa yang mendorong kesuksesan dengan hal yang mencegahnya memperoleh kesuksesan dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Sedangkan pada faktor kedua terdapat teori *differential association* didalamnya yang mendukung individu atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan perbuatannya yang melanggar kejahatan. Hal

ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. Pada teori kontrol sosial juga menyebutkan bahwa deviasi primer adalah yang tidak memandang dirinya sebagai pelanggar.

Pada faktor ketiga terlihat jelas bahwa ekonomi menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi seseorang dalam melakukan kejahatan. Tingginya kecenderungan kriminalitas di kalangan orang *tak berduit* di perkotaan, apalagi yang menjadi penghuni daerah-daerah kumuh, bukan sekadar sebagai kebutuhan langsung untuk menyambung hidup, misalnya terpaksa merampok dan menganiaya atau membunuh korban, sekadar agar dapat makan dan minum.

Lalu pada faktor keempat juga terdapat *differential association theory* didalamnya sebagaimana dijelaskan bahwa bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan tingkah laku kriminal seseorang.

Selanjutnya pada faktor kelima juga terdapat faktor *anomie* (*ketiadaan norma*) di dalamnya dimana seseorang atau kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan dalam satu set aturan-aturan umum tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomi.

Faktor diatas menunjukkan bahwa ada bermacam-macam penyebab terjadinya kejahatan oleh pengamen. Mulai dari faktor ekonomi, agama, lingkungan dan penyimpangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar yaitu oleh:
 - a. Upaya yang dilakukan Polsek Ujung Pandang berupa:
 - 1) Upaya pencegahan yaitu dengan sosialisasi dan pos gabungan;
 - 2) Upaya tindak lanjut, apabila ada laporan maka pihak kepolisian akan menindaklanjuti perkara tersebut sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.
 - b. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar yaitu:
 - 1) Pembinaan pencegahan meliputi:
 - i. pendataan;
 - ii. pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - iii. sosialisasi;
 - iv. kampanye kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
 - 2) Pembinaan lanjutan meliputi:
 - i. perlindungan;

- ii. pengendalian sewaktu-waktu;
- iii. penampungan sementara;
- iv. pendekatan awal;
- v. pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*);
- vi. pendampingan sosial;
- vii. rujukan.

3) Usaha rehabilitasi meliputi:

- i. bimbingan mental spiritual;
- ii. bimbingan sosial;
- iii. bimbingan hukum;
- iv. pelatihan keterampilan dan kewirausahaan;
- v. bantuan stimulan;
- vi. pendidikan non formal (paket a,b,c);
- vii. pembinaan pola kemitraan usaha;
- viii. pelatihan pengembangan bakat seni.

2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan pemusik jalanan (pengamen) di Kota Makassar diakibatkan oleh perasaan sensitif yang dimiliki oleh pengamen, pembelaan diri terhadap razia, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor agama.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah baiknya program Walikota Makassar yang bekerjasama dengan Kelompok Penyanyi Jalanan terus dijalankan agar mereka mempunyai penghasilan yang tetap untuk mendukung finansial mereka.
2. Bagi Dinas Sosial agar melakukan pembinaan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar karena belum sepenuhnya upaya pembinaan dilakukan sesuai peraturan daerah tersebut. Pembinaan yang telah dilakukan juga harus di dukung dengan adanya inovasi-inovasi baru dalam berkesenian sehingga pengembangan bakat seni mereka terus mengikuti perkembangan zaman. Dinas Sosial juga sebaiknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki program sosial di perusahaannya dalam melakukan kegiatan pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana Media Group: Jakarta.

_____. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.

_____. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Alam, A.S., 2010. *Pengantar Kriminologi*. Refleksi: Makassar.

Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Edi Suharto. 2011. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung

Jokie M. S. Siahaan. 2009. *Perilaku Menyimpang Pendekatan Sosiologi*. PT Indeks: Jakarta.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Bina Aksara: Jakarta.

Otje Salman, R., 1993. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Penerbit Alumni: Bandung.

Satjipto Rahardjo. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa: Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo. 1980. *Sosiologi*. Penerbit Alumni: Bandung.

Soerjono Soekanto. 1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*. UI-PRESS: Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Wahju Muljono. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

Skripsi:

Kristiana Devi. 2009. "Dalam Skripsi Interaksi Sosial Pada Pengamen Disekitar Terminal Tirtonadi Surakarta". Universitas Muhammadiyah: Surakarta.

Website:

<http://makassarkota.go.id/107-pendudukkotamakassar.html>. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar. "Sejarah Kota Makassar". 19 April 2016.

